



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat :Kel. Wawali Pasan, Komp.Perkantoran Blok-A

Ratahan, 95695

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**NOMOR : 01/DPMPTSP/IOS/MT/VII- 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**KEPADA PAUD KELOMPOK BERMAIN KALOORAN**  
**DESA BUNAG KECAMATAN TOULUAAN SELATAN**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa dengan di penuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab sekolah/Badan penyelenggara;
- d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b, dan c di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada **PAUD KALOORAN Desa Bunag Kecamatan Touluaan Selatan** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat );
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Pedoman Umum Pelaksanaan program Pendidikan Dasar;  
 2. Berkas permohonan Lembaga PAUD KB KALOORAN Nomor : 38/PO/BNG/III/2021 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Izin Operasional oleh Tim study Kelayakan.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

**Nama Lengkap : MAGRITA MUNDUNG**  
**Nama Lembaga : PAUD KALOORAN**  
**Alamat : DESA BUNAG**  
**Kecamatan : TOULUAAN SELATAN**  
**Kabupaten : MINAHASA TENGGARA**

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD berlaku selama kegiatan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pemegang Izin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
- 3). Memberikan laporan secara berkala kepada dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Izin Operasional akan di cabut.

**KEEMPAT**

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

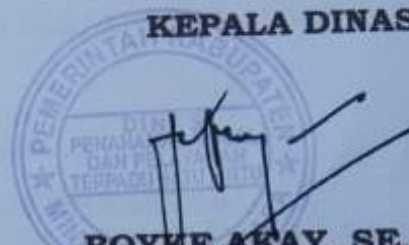
**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ratahan

Pada Tanggal : 12 Juli 2021

**KEPALA DINAS**



**BOYKE AKAY, SE., ME**

**PEMUDA UTAMA MUDA**

**NIP. 19660929 199403 1 009**

**Tembusan Yth:**

1. *Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);*
2. *Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;*
4. *Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;*
5. *Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;*
6. *Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;*
7. *Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;*
8. *Arsip*